

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
PERSEDIAAN ALAT KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH (RSUD) KOTA BAJAWA**

Erwinda Novelania Meo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
windameo38@gmail.com

Linda Lomi Ga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

Herly M. Oematan

herly.oematan@staf.undana.ac.id
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

ABSTRAK

Persediaan alat-alat kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kualitas pelayanan disuatu rumah sakit. Agar dapat terkoordinasi dengan baik, pelaksanaan kegiatan khususnya mengenai persediaan alat-alat kesehatan didalam rumah sakit dibutuhkan suatu sistem pengendalian yang baik dan memadai untuk mengelola persediaan agar tidak terjadi penyelewengan atau kekurangan persediaan serta informasi mengenai persediaan dapat dipercaya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Persediaan Alat Kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Kota Bajawa. Pendekatan penelitian bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal persediaan khususnya persediaan alat-alat kesehatan pada RSUD Kota Bajawa sudah cukup efektif. Namun, masih dibutuhkan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pencatatan yang masih dilakukan secara manual dan perlu dilakukan penambahan anggota atau staf yang memiliki kemampuan yang memadai dibagian logistik.

Kata Kunci: *Persediaan Alat-Alat Kesehatan, Sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).*

ABSTRACT

The supply of medical equipment is a factor that greatly effects the quality of service in a hospital. In order to be well coordinated, the implementation of activities, especially regarding the supply of medical devices in the hospital, requires a good and adequate control system to manage inventory so that there is no deviation or shortage of inventory and reliable information about inventory. Therefore, the purpose of this study was to determine the government's internal control system (SPIP) for the supply of medical devices carried out by the Bajawa City Regional General Hospital. The research approach is descriptive qualitative, using qualitative and quantitative data types. To obtain the necessary data, the researchers used primary data and secondary data.

The results of this study indicate that the internal control of inventory, especially the supply of medical equipment at the Bajawa City General Hospital, is quite effective. However, it is still necessary to evaluate and improve the recording system which is still done manually and it is necessary to add members or staffs who has adequate capabilities in the logistics section of the hospital.

Keywords: *Medical Equipment Supply, Government Internal Control System (SPIP).*

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk sektor publik yang diselenggarakan pemerintah dalam sektor kesehatan yaitu pendirian rumah sakit umum. Rumah sakit termasuk dalam perusahaan jasa yang didirikan dan diselenggarakan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk acuan perawatan, pemeriksaan, tindakan medis, dan tindakan diagnostik lain-lain yang dibutuhkan oleh masing-masing pasien dalam batas-batas teknologi dan sarana yang tersedia, namun perawatan terhadap pasien tidak akan maksimal jika persediaan yang dimiliki rumah sakit tidak lengkap (Safitri, 2015)

Menurut Agoes (2011) menjelaskan bahwa persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Usaha rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, bermutu dan berkesinambungan perlu didukung dengan ketersediaan alat kesehatan yang memenuhi standar. Alat kesehatan merupakan alat, aparat, mesin dan/atau *implant* yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

Agar dapat terkoordinasi dengan baik, melaksanakan pekerjaan rutin khususnya mengenai persediaan alat-alat kesehatan didalam rumah sakit dibutuhkan suatu sistem pengendalian internal yang baik dan memadai untuk mengolah data persediaan agar tidak terjadi penyelewengan maupun kekurangan persediaan serta informasi mengenai persediaan dapat dipercaya. Sistem pengendalian tersebut dikenal sebagai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan. Secara konseptual SPIP mengadopsi konsep sistem pengendalian internal yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the*

Treadway Commission (COSO). Menurut *COSO* dikutip dalam Romney, B and Steinbart (2011), hal. 231, lima komponen dalam pengendalian *COSO* yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bajawa adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada yang melayani masyarakat umum dan BPJS. Didirikan pada tahun 1931 pada masa pemerintahan Belanda dan merupakan rumah sakit dengan tipe C yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yaitu, pelayanan IGD 24 jam, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan di wilayah kabupaten Ngada.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada (2019), rumah sakit umum daerah Kota Bajawa merupakan satu-satunya rumah sakit yang ada di Kabupaten Ngada. Hal tersebut dapat dilihat dari data tentang fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Ngada yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Ngada, 2018

No	Kecamatan	Rum ah Sakit	Pus kes mas	Posya ndu	Balai Pengo batan
	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Aimere	0	1	21	0
2	Jerebuu	0	2	20	0
3	Inerie	0	1	16	0
4	Bajawa	1	3	64	0
5	Golewa	0	2	33	1
6	Golewa Selatan	0	2	23	0
7	Golewa Barat	0	1	25	1
8	Bajawa Utara	0	1	30	0
9	Soa	0	1	22	1
10	Riung	0	2	52	0
11	Riung Barat	0	2	34	0
12	Wolomeze	0	1	17	0
Jumlah/Total		1	19	357	3

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kab. Ngada 2019

Dilihat dari tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah fasilitas kesehatan di kabupaten Ngada terdiri dari 1 rumah sakit umum, 19 puskesmas, 357 posyandu, dan 3 balai pengobatan yang tersebar diberbagai daerah di kabupaten Ngada. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan petugas di RSUD Kota Bajawa, peneliti mendapatkan informasi bahwa RSUD Kota Bajawa menerapkan unsur sistem pengendalian internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008. Namun, dalam kegiatan operasionalnya masih terdapat permasalahan yang terjadi yaitu pemesanan alat kesehatan yang menggunakan sistem *E-Catalog* masih terkendala sistem jaringan sehingga pemesanan alat kesehatan tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan pasien.

Sistem pengendalian internal persediaan diperlukan agar proses terselenggaranya persediaan alat-alat kesehatan di rumah sakit berjalan dengan lancar dan teratur serta adanya fungsi-fungsi yang bertanggung jawab sesuai tugasnya masing-masing dan dengan adanya pengawasan yang lebih intensif kecil kemungkinan terjadi penyimpangan dalam sistem pengendalian internal. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Persediaan Alat Kesehatan pada RSUD Kota Bajawa".

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Theory Agency*)

Teori keagenan (*theory agency*) merupakan teori utama atas pemanfaatan jasa satuan pengawas internal oleh instansi. Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan *principal* dan tujuan agen yang berbeda dapat menimbulkan konflik disebabkan manajer organisasi cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, hal ini mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek organisasi yang menghasilkan keuntungan yang tinggi dalam jangka pendek ataupun panjang daripada mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pelayanannya di rumah sakit (Azizah S, 2016).

Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Mulyadi (2016) mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Komponen Pengendalian Internal Pemerintah

Pengendalian internal terdiri dari beberapa unsur-unsur yang saling berhubungan dalam suatu sistem. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 yang diadopsi dari COSO, pengendalian internal terdiri lima komponen yaitu:

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Resiko
- c. Aktivitas Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Pemantauan

Pengertian Persediaan

Persediaan merupakan sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut (Rudianto, 2012).

Pengendalian Internal atas Persediaan

Pengendalian internal atas persediaan merupakan hal yang penting untuk membentuk keunggulan kompetitif jangka panjang. Tingkat persediaan mempengaruhi harga jual, kualitas, perekrutasaan produk, kapasitas menganggur, waktu lembur, kemampuan merespon permintaan pelanggan, waktu tunggu, dan profitabilitas secara keseluruhan (Siregar, 2013).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Kota Bajawa.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Persediaan Alat Kesehatan di RSUD Kota Bajawa.

Informan Penelitian

Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun informan yang masuk dalam kriteria penelitian ini adalah Bidang Pelayanan Penunjang Medik, Bagian Keuangan, dan Bagian Gudang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data sesuai Miles dan Huberman.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.
3. Penyajian Data (*Data Display*)
Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, *network*, atau grafis sehingga data dapat dikuasai.
4. Pengambilan Keputusan (*Verification*)
Berarti bahwa setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya. Jadi, dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bajawa merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada yang melayani masyarakat umum dan BPJS. RSUD Kota Bajawa didirikan pada masa pemerintahan Belanda, bertempat di Jalan Gajah Mada (sekarang kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BAPPEDA Kabupaten Ngada).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008, terdiri dari:

1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian yang dilakukan oleh RSUD Kota Bajawa sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Dilihat dari struktur organisasi yang diterapkan oleh RSUD Kota Bajawa terdapat struktur organisasi baik secara keseluruhan maupun setiap bagian sesuai SOP yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama ibu Anastasia Ringa, selaku Kasubag Keuangan yang mengatakan bahwa:

“Tentu saja ada. Kalau disini untuk bagian gudang sendiri itu untuk mengelola segala pengelolaan yang berkaitan dengan persediaan dan kalau untuk bagian pelaksana administrasi itu dia hanya mengelola hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran atas pembelian alat-alat kesehatan, sehingga dia hanya mengelola faktur”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sudah ada pembagian tugas yang jelas pada setiap bidang yang ada di rumah sakit berdasarkan fungsinya masing-masing. Namun, terkait struktur organisasi dibagian logistik rumah sakit pengelolaan gudang masih disatukan. Hal ini didukung oleh pernyataan dari ibu Maria Angelina Bhebhe, selaku Bendahara Barang RSUD Kota Bajawa:

“Untuk di logistik rumah sakit untuk pengelolaan gudang, sekarang itu dia punya struktur organisasinya itu yang terkait dengan permintaan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran barang dan bagian pencatatan itu tuh masih disatukan. Karena kita disana masih satu pintu, jadi semuanya terarah disatu tempat yaitu di gudang logistik.

Jadi mulai dari pencatatan awal, penerimaan barang sampai dengan penyimpanan maupun pendistribusian barang ke unit pemakai dan juga bagian pencatatan itu semua kita masih satu pintu, sehingga alurnya itu tuh masih tetap satu. Jadi semua yang terkait itu tuh adanya di gudang logistik yang dikelola oleh ema sendiri sebagai penanggung jawab logistik umum dengan satu staf yang merupakan tenaga kontrak”.

2. Penilaian Resiko

Penilaian resiko atas pencatatan persediaan khususnya persediaan alat kesehatan di RSUD Kota Bajawa sudah dilakukan secara terus menerus dan dilakukan secara manual. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama ibu Anastasia Ringa, selaku Kasubag Keuangan RSUD Kota Bajawa:

“Untuk sistemnya sendiri kita belum ada karena kita masih melakukannya secara manual. Kendalanya kalau untuk pencatatan aset alat kesehatan itu pada saat bendahara menerima pemasukan barang, misalnya ada pengadaan alat kesehatan itu bendahara mencatat jumlah barang yang diterima terus

setelah itu nanti didistribusikan ke ruangan-ruangan untuk dicatat semua di dalam pembukuan bendahara. Itu didistribusikan ke ruangan-ruangan dengan kode barang sudah dikode semua oleh bendahara barang”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sistem pencatatan yang dilakukan oleh RSUD Kota Bajawa menggunakan sistem pencatatan secara manual. Kendala dalam melakukan pencatatan secara manual yaitu ketika bendahara menerima barang yang masuk, bendahara harus mencatat jumlah barang yang diterima. Setelah itu didistribusikan kesetiap ruangan dengan kode barang masing-masing dan dicatat dalam pembukuan bendahara. Hal ini didukung oleh pernyataan dari ibu Maria Angelina Bhebhe, selaku Bendahara Barang RSUD Kota Bajawa:

“Kendalanya itu ada misalnya ada kesalahan dalam proses pencatatan untuk pengamanannya itu nanti bendahara mencatat semua catatan atau data yang masuk setelah itu nanti di cross cek lagi dengan istilahnya itu KIR (Kartu Inventaris Ruangan) dan KIB (Kartu Inventaris Barang)”.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian di RSUD Kota Bajawa yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang ada dibuat sesuai dengan perencanaan rumah sakit. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama ibu Maria Angelina Bhebhe, selaku Bendahara Barang RSUD Kota Bajawa:

“Kalau disini ema menjawab tentang dokumen pengadaan itu. Dokumen pengadaan itu dibuat sesuai dengan perencanaan dan juga dokumen itu didalamnya itu mengisi tentang spesifikasi barang, terus jangka waktu pelaksanaan pendistribusian barang, harga barang, dan juga semuanya sudah ada didalam sehingga terhadap suatu barang itu kita sudah bisa mengetahui dia punya nilainya, jumlahnya, dan kualitasnya. Terus didalam itu semua kegiatan itu berdasarkan dokumen-dokumen pengadaan. Jadi, tidak semua barang itu kita belanja langsung, tapi yang semuanya itu terkait dengan pengadaan harus kita gunakan pihak ketiga”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dokumen pengadaan dibuat sesuai dengan perencanaan yang berisi tentang

spesifikasi barang, jangka waktu pelaksanaan pendistribusian barang, dan harga barang sehingga terhadap suatu barang sudah bisa diketahui nilai, jumlah, dan kualitasnya. Hal ini didukung oleh pernyataan dari bapak Felix Fonu, Amd selaku Kasi Pelayanan Penunjang Medik RSUD Kota Bajawa:

“Iya. Artinya, terdapat lima faktur yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan arsip dan lainnya juga biasanya kartu persediaan. Faktur dengan kartu persediaan itu tuh biasanya itu dia sudah mencantumkan semua informasi yang dibutuhkan, contohnya itu tuh misalnya untuk tanggal keluar atau masuk, terus tanggal penerimaan, tanda tangan penerima, dan juga harga dari barang-barangnya itu tuh”.

4. Informasi dan Komunikasi

Pada RSUD Kota Bajawa, memastikan terjalannya komunikasi yang efektif, yaitu untuk mengetahui berfungsinya pengendalian internal dan menginformasikan mengenai kode etik yang berlaku dengan menggunakan berbagai bentuk sarana dalam mengkomunikasikan informasi penting. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu Anastasia Ringa, selaku Kasubag Keuangan RSUD Kota Bajawa:

“Ya, kita disini itu melakukannya dengan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, itu biasanya macam pedoman kebijakan dan prosedur, terus surat edaran rapat staf, ada juga laporan bulanan termasuk juga itu tuh tindakan pimpinan yang mendukung implementasi SPIP informasi dari sumber internal dan eksternal yang relevan dengan tugas dan fungsi itu telah diperoleh terus disampaikan kepada pimpinan”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi dan komunikasi baik itu informasi fisik berupa dokumen maupun yang berupa informasi lisan antar sesama pegawai cukup baik. Hal ini dikarenakan adanya komunikasi antar bagian-bagian, misalnya komunikasi menggunakan telepon, mengadakan rapat bersama, dan transaksi-transaksi yang terjadi selalu dicatat. Hal ini didukung oleh pernyataan dari bapak Felix Fonu, Amd selaku Kasi Pelayanan Penunjang Medik RSUD Kota Bajawa:

“Ya, artinya itu disini kami melakukan informasi itu misalnya, berkomunikasi lewat telepon apabila ada hal-hal yang mendesak atau mungkin ada kesalahpahaman informasi, dikarenakan ruangan antar bagian yang satu dengan bagian yang lain itu tuh yaa lumayan agak jauh jadi supaya memudahkan itu kami menggunakan telepon. Ada juga dalam bentuk surat, kalo dalam bentuk surat itu tuh misalnya, ada pesanan dari setiap unit untuk kebutuhan alat kesehatan. Kemudian biasanya itu diadakan rapat bersama kepala ruangan dan kepala rumah sakit”

5. Pemantauan

Pengecekan dan evaluasi yang dilakukan di RSUD Kota Bajawa terhadap persediaan sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama ibu Anastasia Ringa, selaku Kasubag Keuangan RSUD Kota Bajawa:

“Iya ada, biasanya dilakukan *crosscheck* setiap bulan dan biasanya itu pengecekannya dilaksanakan oleh bagian gudang. Untuk inspeksi atau evaluasinya biasanya pimpinan kami dalam hal ini Direktur RSUD Kota Bajawa sering melakukan *work round* atau inspeksi keliling terhadap unit-unit yang ada di RSUD Kota Bajawa. Jadi, bukan hanya unit yang mengurus soal peralatan kesehatan saja tetapi terhadap semua unit-unit atau bagian-bagian yang ada di lingkungan rumah sakit”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dilakukannya *stock opname* setiap bulan untuk dapat mengetahui jumlah barang yang adadikartu maupun dengan fisik barang sehingga bisa diketahui berapa jumlah barang dan lama penggunaan dari barang tersebut yang dapat memenuhi kebutuhan pasien di RSUD Kota Bajawa. Biasanya juga dilakukan *crosscheck* setiap bulan yang dilaksanakan oleh bagian gudang dan untuk evaluasi atau inspeksinya sendiri dilakukan oleh pimpinan rumah sakit dalam hal ini Direktur RSUD Kota Bajawa. Hal ini didukung oleh pernyataan dari bapak Felix Fonu, Amd selaku Kasi Pelayanan Penunjang Medik RSUD Kota Bajawa:

“Iya kalau pengecekannya itu pasti ada dan itu dilakukan oleh bagian gudang. Pengendalian resiko itu biasanya dilakukan evaluasi terhadap karyawan-

karyawan yang ada di rumah sakit. Nah, dari hasil tersebut maka didapatkan penilaian kinerja terhadap semua karyawan yang ada di RSUD Kota Bajawa”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang dijalankan di RSUD Kota Bajawa sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Lingkungan pengendalian yang dilakukan di RSUD Kota Bajawa telah menggambarkan keseluruhan sikap yang mempengaruhi kesadaran dan tindakan anggota atau staf organisasi. Namun terkait dengan unsur kelima dari lingkungan pengendalian tentang struktur organisasi, pengelolaan gudang dibagian logistik rumah sakit masih disatukan. Pengelolaan gudang berkaitan dengan kegiatan permintaan, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang serta pencatatan semuanya terarah disatu tempat yaitu gudang logistik yang hanya dikelola oleh satu penanggungjawab logistik umum ditambah dengan satu staf yang merupakan tenaga kontrak.

2. Penilaian Resiko

Penilaian resiko atas pencatatan persediaan khususnya persediaan alat kesehatan di RSUD Kota Bajawa sudah dilakukan dengan baik, karena disetiap pencatatan dilakukan *cross cek* lagi menggunakan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB). Namun, dalam unsur penilaian resiko RSUD Kota Bajawa perlu untuk melakukan evaluasi atas sistem pencatatan yang digunakan. Hal ini dikarenakan RSUD Kota Bajawa masih menggunakan sistem pencatatan secara manual yang dapat menimbulkan resiko seperti, pemalsuan catatan akuntansi, kegagalan tujuan dan sasaran, dan pelanggaran penggunaan dana.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian yang dijalankan RSUD Kota Bajawa sudah dilaksanakan dengan baik, karena dokumen-dokumen yang ada dibuat sesuai dengan perencanaan dan memuat tentang spesifikasi barang, jangka waktu pelaksanaan pendistribusian, dan harga barang. Pemisahan fungsi tugas

mengenai kegiatan yang dilakukan oleh setiap karyawan sudah dilaksanakan dengan cukup baik, dimana ditempatkannya setiap karyawan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya dimasing-masing unit yang ada untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien. Namun, adapun sedikit persoalan yang terjadi dimana dibagian logistik rumah sakit mengalami kekurangan staf dalam melakukan pengelolaan gudang berkaitan dengan permintaan, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang yang dikelola oleh satu penanggungjawab logistik umum dan satu staf tenaga kontrak. Terhadap persediaan peralatan yang rusak, terdapat bagian elektromedik yang berfungsi sebagai bagian yang melakukan pemeliharaan terhadap alat kesehatan. Terdapat penanggungjawab inventaris disetiap unit dalam pendistribusian alat kesehatan, sehingga jika terdapat kelalaian dari petugas maka unit tersebut harus bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi.

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi yang dijalankan oleh RSUD Kota Bajawa, baik itu informasi fisik berupa dokumen maupun yang berupa informasi lisan antar sesama pegawai dilaksanakan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya komunikasi antar bagian-bagian, misalnya komunikasi menggunakan telepon, mengadakan rapat bersama, dan transaksi-transaksi yang terjadi selalu dicatat. Adapun pedoman kebijakan dan prosedur, laporan bulanan termasuk tindakan pimpinan yang mendukung implementasi SPIP informasi dari sumber internal dan eksternal yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

5. Pemantauan

Pengecekan dan evaluasi yang dilakukan di RSUD Kota Bajawa terhadap persediaan sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya *stock opname* setiap bulan untuk dapat mengetahui jumlah barang yang adadikartu maupun dengan fisik barang sehingga bisa diketahui berapa jumlah barang dan lama penggunaan dari barang tersebut yang dapat memenuhi kebutuhan pasien di RSUD Kota Bajawa. Biasanya juga dilakukan *crosscheck* setiap bulan yang dilaksanakan

oleh bagian gudang dan untuk evaluasi atau inspeksinya sendiri dilakukan oleh pimpinan rumah sakit dalam hal ini Direktur RSUD Kota Bajawa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam pencarian informasi yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Persediaan Alat Kesehatan dengan tetap membandingkan atau menyesuaikan dengan referensi yang sama.

2. Bagi Objek Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti berusaha memberikan saran kepada RSUD Kota Bajawa yang bermanfaat dalam mengatasi kelemahan yang terdapat dalam sistem pengendalian internal atas persediaan alat kesehatan. Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan yaitu, diharapkan agar melakukan penambahan anggota atau staf yang memiliki kemampuan yang memadai untuk bertugas di bagian logistik agar dapat mencegah terjadinya kesalahan dan mempermudah kegiatan operasionalnya, dalam hal pencatatan yang masih dilakukan secara manual diperlukan alat bantu seperti komputer untuk mencegah kemungkinan terjadinya pemalsuan catatan akuntansi dan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah, dan kelengkapan alat komunikasi harus terus dijaga.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

1) Setelah dilakukan penelitian ini, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar menggali lebih dalam lagi terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Persediaan Alat Kesehatan dengan metode penelitian yang bervariasi.

2) Peneliti selanjutnya juga diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data agar penelitian yang dilakukan berjalan dengan baik.

3) Untuk keakuratan data disarankan untuk menggunakan data yang telah tersedia dan terpublikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2011) *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Azizah S (2016) 'Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(10).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada (2019) *Kabupaten Ngada dalam Angka*. Edited by Bajawa.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014) *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 118/Menkes/SK/IV/2014 tentang Komentarium Alat Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mulyadi (2016) *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 (2008) 'tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.'
- Romney, B, M. and Steinbart, P. J. (2011) *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto (2012) *Pengantar Akuntansi dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Safitri (2015) 'Analisis Pengendalian Intern Atas Pelaksanaan Prosedur Persediaan Obat-Obatan pada Rumah Sakit PHC Surabaya.', *E-Journal Akuntansi "EQUITY"*, 1(2).
- Siregar, B. (2013) *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.